

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT  
DALAM PENYELESAIAN PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH  
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**Ester Resimeilana Lumbantoruan**

**2002190005**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ester Resimeilana Lumbantoruan

NIM : 2002190005

Program Studi : Hukum Program Magister

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELESAIAN PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 25 Oktober 2022



**Ester Resimeilana Lumbantoruan**  
NIM: 2002190005



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT  
DALAM PENYELESAIAN PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH  
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA**

Oleh:

Nama : Ester Resimeilana Lumbantoruan  
NIM : 2002190005  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

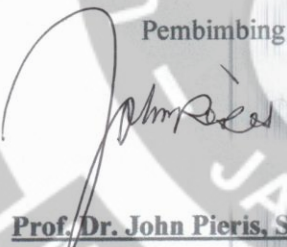
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

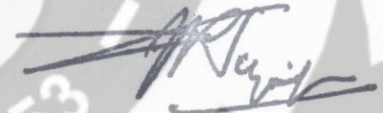
Jakarta, 25 Oktober 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**

  
**Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H.**

NIDN: 9990463325

NIDN: 0326116401

  
Ketua  
Program Studi Hukum Program Magister

  
**Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.**

  
Direktur  
Program Pascasarjana

  
**Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.**



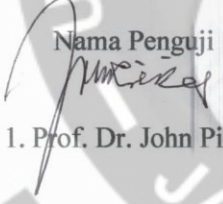


**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 25 Oktober 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ester Resimeilana Lumbantoruan  
NIM : 2002190005  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELESAIAN PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sebagai Ketua .....	
2. Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H.	Sebagai Anggota.....	
3. Dr. Fauzan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota.....	

Jakarta, 25 Oktober 2022



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ester Resimeilana Lumbantoruan  
NIM : 2002190005  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Penyelesaian  
Penegasan Batas Antar Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota  
Seluruh Indonesia

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 25 Oktober 2022



**Ester Resimeilana Lumbantoruan**  
NIM: 2002190005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Penyelesaian Penegasan Batas Antar Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., selaku Direktur Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia;
2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia;
3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang saya hormati, sayangi dan banggakan, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, bimbingan, motivasi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta dedikasi pada proses penyusunan tesis;
4. Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan selama masa perkuliahan;
5. Tim penguji Dr. Fauzan, S.H., M.H., yang turut berkontribusi memberikan masukan dan kritik yang bersifat konstruktif terhadap tesis ini;
6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar, Ibu Jessica selaku tenaga administrasi, dan Bryant dan Ibu Egi Aritonang selaku pengurus perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia atas ilmu dan bantuannya dalam masa perkuliahan dan penyusunan tesis;
7. Kedua orang tua penulis Bapak St. Ranto Lumbantoruan dan Ibu Nurli Simanihuruk, yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa sehingga saya bisa maju untuk mengambil gelar magister dan menyelesaikan tesis ini. Juga Mertua saya Bapak P Sianipar dan Ibu R Silaban;
8. Serta suami tercinta Andrew Yosua Parlinggoman Siniapar yang sangat supportif selama saya melaksanakan dan mengerjakan tesis ini dan menyemangati saya sampai saya bisa menyelesaikan penulisan ini;

9. Kakak saya Maria Maghdalena, adik Robin Sartua Kennedy dan Imelda Putri juga adik ipar Etty Siahaan yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, kekuatan, semangat dan kasih sayang yang tidak pernah henti dalam masa perkuliahan dan pengerjaan tesis;
10. Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA., selaku Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang selalu mendorong dan memotivasi untuk menempuh serta menyelesaikan pendidikan di Universitas Kristen Indonesia;
11. Sugiarto, SE, M.Si, Direktur Toponimi dan Batas Daerah atas kesempatan dan kebijakan memberikan waktu untuk penulis menyelesaikan perkuliahan dan proses penelitian;
12. Rekan-rekan Ditjen Bina Adwil Nastasya, Ana Maisyaroh Indrayanti, Yossia Herlin Alvionora, Putri Sari Dewi, Yosi Ariastuti, yang membantu penulis memperoleh data-data pendukung;
13. Teman-teman Magister Hukum Angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kekompakan, support, dan dukungannya selama masa perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan tesis;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Saya menyadari terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh pihak dapat memberikan masukan yang bermanfaat demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 25 Oktober 2022

Peneliti

## DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Keaslian Tugas Akhir.....	ii
Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir .....	iii
Lembar Persetujuan Tim Penguji Akhir.....	iv
Lembar Prnyataan Persetujuan Publikasi .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tahapan Penelitian.....	5
1.4.2. Metode Analisa Data .....	7
1.4.3. Telaah Penelitian Sebelumnya.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	11
2.1.1 Kerangka Teoritis .....	11
2.1.2 Kerangka Konsep.....	14
2.2 Teori Kewenangan.....	14
2.2.1. Sumber Kewenangan .....	19
2.2.2. Sifat Kewenangan.....	20
2.2.3. Batasan Kewenangan.....	21
2.3 Teori Konstitusi .....	22



BAB III HASIL PENELITIAN .....	36
3.1 Pentingnya Wilayah Dalam Suatu Negara.....	36
3.2 Data Segmen Batas.....	44
3.3 Peranan Penegasan dan Penetapan Batas Daerah.....	56
3.4 Lambatnya penyelesaian batas daerah terjadi karena adanya permasalahan batas baik masalah teknis ataupun non teknis.....	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3. 1 Data Segmen Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi di Indonesia.....	41
Tabel 3. 2(Rekapitulasi Data Poligon Batas Kabupaten/Kota).....	42
Gambar 4. 1 Sumber-sumber konflik atas Sumber Daya Alam (SDA).....	52
Gambar 4. 2 Tahapan Penegasan Batas Daerah menurut Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.....	70



**AUTHORITY OF CENTRAL GOVERNMENT  
IN THE SETTLEMENT OF BOUNDARIES BETWEEN PROVINCE, REGIONAL/CITY IN  
INDONESIA**

By  
Ester Resimeilana  
200219005

**ABSTRACT**

*State territory is the territory of power or authority of the state. Regional regulation is carried out to provide legal certainty and establishment to citizens regarding the territory of the country. Within the territory of the country, there is a separation between one region and another called the interregional boundary. The existence of a Minister and the law on territorial boundaries in an area is the result of affirmation of the boundaries set by the State Regulation with the product of the State Regulation. The affirmation of inter-regional boundaries becomes the authority of the central government and establishes provincial and district/city boundaries based on the principles of deconcentration and co-administration. The rise of cases of territorial boundary disputes can be triggered by one of them the unclear administrative boundaries between the new autonomous regions and the old regions. The problem then spreads to various dimensional conflicts such as social conflicts and natural resource conflicts. This study aims to analyze various practices of resolving regional boundary disputes by using certain methods in resolving territorial boundary disputes and analyzing the authority carried out by the central government as a regulator where the impact of regional expansion so that regional boundaries arise.*

*The use of the normative juridical method is carried out in this study to examine the provisions in the legislation as a reference that has been carried out by the central government for resolving territorial disputes. Several case studies show that there are many things that must be considered considering the complexity of the conflict in each segment which has different aspects of conflict. The effectiveness of the policies carried out by the central government also cannot be compared with each region because of the different problems that exist. This is because the decisions taken are not in favor of any region and are based on data and documents of applicable laws and regulations. The results of the decision can be obtained because in policy making cannot satisfy all parties but accommodate both parties.*

*Key words : Regional Boundaries, Authorities, Central Government, Border Dispute,  
Regional Boundary Affirmation Team*

**KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT  
DALAM PENYELESAIAN PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH PROVINSI,  
KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA**

Oleh  
Ester Resimeilana  
200219005

**ABSTRAK**

Wilayah negara merupakan wilayah kekuasaan atau wewenang dari negara (state domain). Pengaturan wilayah negara dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara. Di dalam wilayah negara itu, terdapat adanya suatu pemisahan antara daerah satu dengan daerah lainnya yang disebut batas antardaerah. Adanya kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah di suatu daerah merupakan hasil dari penegasan batas yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan produk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penegasan batas antardaerah menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan membentuk tim penegasan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Maraknya kasus sengketa batas wilayah dapat dipicu oleh salah satunya ketidakjelasan batas-batas wilayah administratif antara daerah otonomi baru dengan wilayah lama. Persoalan ini kemudian merambah ke berbagai konflik dimensional seperti konflik sosial dan konflik sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai praktik penyelesaian sengketa batas wilayah dengan melihat efektifitas penggunaan metode tertentu dalam penyelesaian sengketa batas wilayah dan menganalisa kewenangan yang dilakukan pemerintah pusat selaku regulator dimana dampak dari pemekaran daerah sehingga timbulnya batas wilayah.

Penggunaan metode yuridis normatif dilakukan pada penelitian ini untuk meneliti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai acuan menganalisa kewenangan yang telah dilakukan pemerintah pusat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. Beberapa studi kasus menunjukkan banyak hal yang harus dipertimbangkan mengingat kompleksnya konflik di masing-masing segmen yang memiliki aspek konflik yang berbeda. Efektif atau tidaknya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga tidak dapat dibandingkan setiap daerah karena perbedaan permasalahan yang ada. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil tidak memihak daerah manapun dan berdasarkan pada data dan dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil keputusan sengketa dapat menimbulkan ketidakpuasan karena dalam pengambilan kebijakan tidak dapat memuaskan semua pihak tetapi mengakomodir kedua belah pihak.

**Kata kunci : Batas Daerah, Kewenangan, Pemerintah Pusat, Sengketa Batas Wilayah,  
Tim Penegasan Batas Daerah**